

# **SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK (SLF): Sebuah Pendekatan (Baru) dalam Kajian Kemiskinan dan Pembangunan Pedesaan<sup>1</sup>**

**Oleh:**

**Mahdi, Ph.D**

Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang  
E-mail: [kuteihmahdi@yahoo.com](mailto:kuteihmahdi@yahoo.com)

## **Abstrak**

Persoalan kemiskinan dan pembangunan pedesaan terus diperdebatkan. Namun, dunia akademis dan pengambil kebijakan di Indonesia tidak banyak mengikuti perkembangan pemikiran ini karena kita disibukkan oleh krisis sosial, politik dan ekonomi selama satu dekade terakhir. Padahal penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pedesaan Indonesia memerlukan energi dan terobosan baru, mengingat program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan. Dalam paper ini saya menjelaskan tentang perkembangan pemikiran dalam studi pembangunan pedesaan dan kemiskinan, dimana *sustainable livelihood framework* (SLF) adalah pendekatan yang banyak dirujuk dalam laporan akademis berkaitan dengan studi kemiskinan dan pembangunan pedesaan. SLF merupakan akumulasi dan koreksi atas pemikiran yang berkembang dalam dekade-dekade sebelumnya. Beberapa kelebihan SLF dibanding pendekatan sebelumnya adalah: (1) menempatkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sebagai pusat analisis, (2) menilai intervensi kebijakan dan kegiatan pembangunan yang melewati batasan sektoral, (3) membangun keterkaitan antara makro-mikro, (4) responsif dan partisipatif, (5) membangun kekuatan, (6) mempertimbangkan keberlanjutan secara luas, ekonomi, sosial, kelembagaan dan lingkungan. SLF sudah diaplikasikan dalam penyusunan program terkait dengan pengentasan kemiskinan di berbagai belahan dunia. Namun demikian, beberapa kritikan atas kelemahannya juga mengemukakan yang memberikan peluang bagi pengembangannya di masa depan.

## **I. PENDAHULUAN**

Persoalan kemiskinan dan pembangunan pedesaan telah menarik perhatian banyak akademisi sejak lama, baik untuk menganalisis maupun untuk menyusun kebijakan untuk menanggulangnya. Berbagai pendekatan telah dikembangkan, terutama sejak awal tahun 1950-an (Ellis dan Biggs, 2001). Mulai dari pendekatan modernisasi sampai pendekatan pembangunan pedesaan terpadu, partisipatif dan bahkan terakhir adalah pendekatan *sustainable livelihood*. Berbeda dengan pendekatan pembangunan pedesaan sebelumnya, pendekatan terakhir ini kurang mendapatkan perhatian yang luas di Indonesia, walau *framework* ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2001 oleh *Department for International Development* (DFID) pemerintah Inggris (Carriere, 2001) yang secara konseptual dilatarbelakangi oleh pemikiran (Chambers, 1995; Chambers dan Conway, 1992). Sedikit sekali laporan akademis yang menggunakan pendekatan ini dalam menganalisis pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di

---

<sup>1</sup> Makalah disampaikan Seminar Nasional Dalam Rangka Kongres Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) ke VII, Bukittinggi, 13 Agustus 2009

Indonesia. Padahal ditempat lain, pendekatan *sustainable livelihood* digunakan secara luas baik dalam menganalisis kebijakan pembangunan, menyusun perencanaan intervensi dan juga menjadi alat analisis dalam melakukan penelitian, seperti di Asia Selatan (Hussein dan Nelson, 1998; Turton, 2000a), di Afrika (Allison dan Horemans, 2006; Beck dan Nesmith, 2001; Bradstock, 2005; Ellis dan Bahiigwa, 2003; Glavovic dan Boonzaier, 2007; Kazoora, 2002; Shackleton *et al.*, 2007), di Amerika Latin (Bebbington, 1999), bahkan di Asia Tenggara, seperti di Thailand (Parnwell, 2005), Kamboja (Turton, 2000b) dan Laos (Bouahom *et al.*, 2004). Baru pada beberapa tahun terakhir terdapat penggunaan pendekatan ini dalam beberapa laporan akademis di Indonesia (Mahdi, 2008; Mahdi *et al.*, 2009; Yonariza, 2007).

Menurut hemat penulis, ada empat hal yang menyebabkan kurang berkembangnya pendekatan ini di kalangan akademisi Indonesia. **Pertama**, SLF adalah pendekatan yang penggunaannya berkembang luas sejak awal 2000-an, sementara kita di Indonesia dalam waktu yang sama disibukkan oleh persoalan kekacauan sosial politik sebagai konsekwensi dari krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an. Perhatian terhadap persoalan kemiskinan hanya terfokus pada bantuan darurat jaring pengaman sosial (JPS), sementara pemikiran untuk pembangunan jangka panjang dan *sustainable* kurang mendapatkan perhatian. **Kedua**, perhatian pada pembangunan pedesaan memang mengalami penurunan selama dekade terakhir, tidak hanya di Indonesia melainkan juga secara global (Bezemer dan Headey, 2008), setelah pendekatan-pendekatan pembangunan pedesaan sebelumnya tidak memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Pembangunan lebih banyak diarahkan pada kawasan perkotaan, yang merupakan konsekwensi dari liberalisasi ekonomi yang kita tempuh setelah krisis (Gellert, 2005; San *et al.*, 2000). Liberalisasi ekonomi mengarahkan kegiatan pembangunan ekonomi pada sektor yang memberikan efisiensi yang tinggi dan konsekwensinya menggesampingkan faktor pemerataan. **Ketiga**, alokasi anggaran untuk penelitian dan pendidikan mengalami kontraksi yang signifikan, sebagai konsekwensi krisis ekonomi yang kita hadapi. Berkurangnya pembiayaan pendidikan ini memberikan peluang yang terbatas bagi peneliti dan akademisi kita mengembangkan konsep ini dalam kajian kemiskinan dan pedesaan. **Keempat**, restrukturisasi dan reposisi kajian pembangunan pedesaan dan kemiskinan di beberapa perguruan tinggi, terutama jurusan sosial ekonomi pertanian, mendorong kepada bidang kajian agribisnis yang lebih menekankan kepada manajemen berbasis pasar, cenderung mengesampingkan aspek pembangunan kemasayarakatan.

Sungguhpun demikian, persoalan kemiskinan tetap masih menjadi isu sentral dalam pembangunan pedesaan. Rahman dan Westley (2001) menekankan bahwa satu-satunya jalan untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan memfokuskan perhatian pada pembangunan pedesaan. Oleh karena itu, pemikiran tentang pembangunan pedesaan ini terus berkembang pula. Kita, kaum akademisi di Indonesia, hendaknya juga terlibat aktif dalam debat persoalan ini, baik untuk maksud berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mengadopsi dan mengadaptasi pendekatan yang berkembang tersebut bagi kepentingan pembangunan nasional kita. Dalam paper ini, kami menguraikan pendekatan *sustainable livelihood* ini dengan penjelasan beberapa kelebihanannya dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Pengalaman penggunaan pendekatan ini di seluruh dunia, termasuk pengalaman penulis menggunakannya di Indonesia, pada berbagai bidang dan maksud juga

kami coba ringkaskan untuk melihat sejauhmana pendekatan ini telah membantu kita dalam menguraikan kompleksitas persoalan kemiskinan dan pembangunan pedesaan. Sungguhpun demikian, beberapa kritikan terhadap pendekatan ini masih banyak ditemukan. Kritikan ini juga menjadi catatan bagi kita untuk terus berusaha memperbaiki dan mengembangkan *framework* ini, atau bahkan mencari alternatif pemikiran lainnya bagi upaya mencari jalan keluar dalam menuntaskan persoalan kemiskinan yang dihadapi umat manusia.

## II. OVERVIEW PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KEMISKINAN

Pada bagian ini saya hanya me-review secara ringkas evolusi pemikiran pembangunan pedesaan dan kemiskinan. Maksud overview ini adalah untuk menghantar diskusi kita pada *sustainable livelihood*, yang mana pemikiran ini pada prinsipnya adalah akumulasi, perbaikan dan tambahan dari pemikiran-pemikiran pembangunan yang sudah berkembang sebelumnya. Dalam overview ini, saya tidak memisahkan dengan tegas antara pemikiran pembangunan pedesaan dan pemikiran pembangunan secara luas seperti yang disarikan oleh Ranis (2004), dan pembangunan pertanian yang disarikan oleh Madjan (1994), karena pada prinsipnya pensarian itu objeknya adalah sama, yakni teori-teori pembangunan di negara-negara berkembang, yang membedakan hanyalah sudut pandang dari bidang mana kedua penulis tersebut meringkaskannya. Ellis dan Biggs (2001) menyusun perkembangan pemikiran pembangunan pedesaan dan kemiskinan menurut *sequential* waktu sejak tahun 1950-an hingga ke awal tahun 2000-an.

Konsepsi pembangunan pedesaan dan kemiskinan mengalami perkembangan pesat sejak awal tahun 1950-an. Perkembangan ini di dorong oleh munculnya negara merdeka baru setelah perang dunia kedua yang memulai pembangunan masyarakatnya. Pada saat yang bersamaan berbagai lembaga donor dan negara maju mencari cara efektif untuk membantu negara baru merdeka tersebut.

Pada tahun 1950-an, pemikiran pembangunan pedesaan diawali dengan premis bahwa masyarakat pedesaan miskin karena mereka tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, terbelakang cara berfikir, budaya dan teknologi produksinya. Terdapat dua kelompok pemikiran bagaimana pembangunan dilakukan. Pertama, pembangunan diarahkan untuk memodernisasi masyarakat dan ekonomi pedesaan melalui peningkatan produktivitas. Kedua adalah mengembangkan model ekonomi dualisme yang didasarkan pada pemikiran Booke (1954), yakni pembangunan hanya dilakukan pada sektor ekonomi modern, sementara ekonomi subsisten dibiarkan saja karena masyarakatnya yang malas. Pemikiran ini di lengkapi pula oleh pandangan bahwa pembangunan sektor modern akan mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor ekonomi yang produktivitas rendah ke yang berproduktivitas tinggi (Lewis, 1954)

Pandangan ini mendapatkan tantangan dari Schultz (1964) yang mempublikasi "*Transforming Traditional Agriculture*" pada tahun 1964 dan Scott (1968) yang menjelaskan tentang moral ekonomi petani. Petani traditional adalah pelaku ekonomi yang rasional. Lambannya mereka menerima teknologi baru adalah strategi yang mereka pilih secara sadar sesuai dengan keterbatasan

pengusaan sumber daya dan resiko yang akan mereka hadapi dalam menjalankan usaha dan penghidupannya. Pendapat ini melandasi pemikiran bahwa pembangunan pedesaan harus dilakukan melalui transfer teknologi untuk meningkatkan produktivitas usahatani. Pemikiran kelompok Schultz dan Scott ini mewarnai debat teori pembangunan sepanjang tahun 1960-an hingga pertengahan 1970-an dan menjadi landasan teoritis bagi "**revolusi hijau**".

Pada era 1970-an, pemikiran pembangunan ala 1960-an terus berlanjut dengan beberapa penyempurnaan seperti pembagian manfaat yang adil dari pertumbuhan ekonomi yang dialami akibat transfer teknologi. Untuk itu, kebijakan penting yang direkomendasikan adalah perlunya campur tangan pemerintah dalam pembangunan pertanian seperti menyediakan kredit murah kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengakses kredit dari lembaga resmi, menyediakan jasa penyuluhan gratis, menyediakan infrastruktur pedesaan dan mengendalikan harga input dan output pertanian. Revolusi hijau yang mulai dicanangkan pada akhir tahun 1960-an, mendapatkan fokus perhatian bagi pengambil kebijakan pada hampir semua negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin dan Afrika. Indonesia, misalnya, mengontrol dengan ketat ekonomi perberasan melalui pengendalian harga dan penyediaan paket teknologi panca usahatani untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan menekan kesenjangan pembagian pendapatan.

Berlanjut ke tahun 1980-an, akses negatif revolusi hijau mulai terasa. Selain itu, campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi, ditambah pula dengan terjadinya resesi perekonomian di tingkat global. Secara empiris, Tjondronegoro (1984) melaporkan terjadi peningkatan kesenjangan pembagian pendapatan sebagai dampak revolusi hijau di Jawa. Pemilik tanah adalah kelompok yang sangat diuntungkan oleh kebijakan revolusi hijau ini, karena semua program pemerintah diperuntukkan bagi petani pemilik lahan. Kasryno (1985) menemukan terjadi peningkatan pengangguran dipedesaan sebagai akses negatif revolusi hijau, karena pemilik lahan padi sawah mengurangi penggunaan tenaga kerja dan beralih menggunakan mesin untuk menekan biaya produksi usahatani. Dalam tataran akademis berkembang perdebatan untuk menemukan cara untuk menekan akses negatif ini. Saran untuk kembali mengurangi campur tangan pemerintah dan memberikan perhatian yang besar pada pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan pembagian pendapatan. Kebijakan ini selaras pula dengan dorongan pemikiran untuk meliberalisasi perekonomian makro. Berbagai kebijakan deregulasi diluncurkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi berkembangnya pasar dan dunia usaha.

Pada awal tahun 1990-an, mulai berkembang pemikiran untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Issu-issu pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat mulai tumbuh dan berkembang, seiring dengan semakin popularnya buku yang ditulis oleh Chambers (1983) "*Rural Development: Putting the Last First*" dan diikuti dengan perkembangan metode *rapid rural appraisal* (RRA) dan *participatory rural appraisal* (PRA) (Chambers, 1992). Selain itu, pertemuan bumi Rio de Janeiro 1992 yang menekankan pada sustainability (keberlanjutan) ikut memberikan warna pemikiran pembangunan pedesaan dan studi kemiskinan. Saran komisi Bruntland, yang mengingatkan pentingnya keseimbangan pembangunan antara tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (WCED, 1987), disepakati arah implementasinya dalam

pertemuan bumi tersebut dengan tersusunnya Agenda 21, yakni agenda untuk menyeimbangkan proses pembangunan pada tiga pilar tersebut.

Penghujung tahun 1990-an diakhiri dengan krisis ekonomi di negara-negara Asia Timur, negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sejak 1970-an. Krisis ekonomi ini mengkhawatirkan banyak pihak, terutama efeknya terhadap peningkatan angka kemiskinan. Warr (2000) melaporkan bahwa krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara telah menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Suryahadi *et al.* (2003) mencatat bahwa pada tahun 1998, saat mana krisis ekonomi Indonesia ada pada puncaknya, angka kemiskinan juga melonjak tajam dari 15,4% pada pertengahan tahun 1997 melonjak menjadi 33,2% pada pertengahan tahun 2008. Keadaan darurat ini direspon dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan crash program seperti jaring pengaman sosial (Paitoonpong *et al.*, 2008). Indonesia, pada tahun 1999, meluncurkan program pemberdayaan daerah mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE), kemudian dilanjutkan dengan program beras bagi rumah tangga miskin (Raskin) dan belakangan ditambah lagi dengan bantuan langsung tunai (BLT). Program-program ini diluncurkan untuk mencegah terjadinya kelaparan dan malnutrisi. Untuk kasus Indonesia, karena lambannya *recovery* dari krisis ekonomi, program-program tersebut masih dilanjutkan sampai sekarang.

Sementara itu, pada belahan lain dunia, di London, Inggris pada tahun 1998, dilakukan konferensi tentang *Sustainable Livelihood*, sebuah pendekatan dalam menganalisis pembangunan pedesaan dan kemiskinan yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Chambers dan Conway (1992). Dalam konferensi ini pengalaman dan konsep pemikiran tentang livelihood diakumulasi dan didiskusikan. DFID, sebagai inisiator, kemudian mengembangkan secara skematis pemikiran sustainable livelihood tersebut menjadi sebuah framework, yang kita kenal dengan *Sustainable Livelihood Framework (SLF)*. SLF ini merupakan akumulasi dan koreksi atas konsep dan pendekatan studi dan program pengentasan kemiskinan yang berkembang pada masa sebelumnya. Konsep inilah yang banyak mewarnai jagat akademis tentang pembangunan pedesaan dan kemiskinan tahun 2000-an.

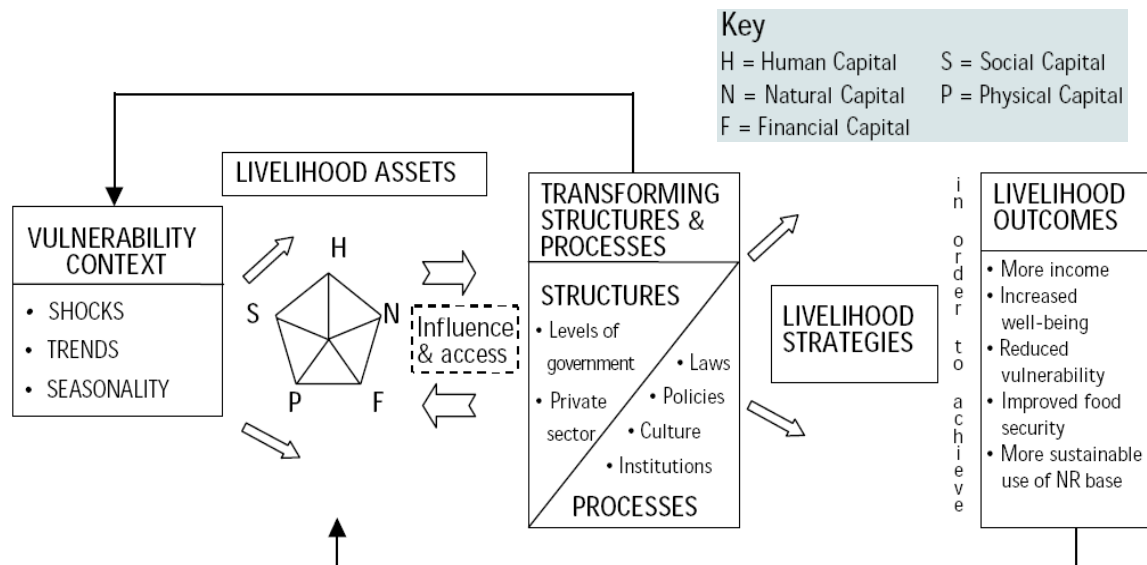
### **III. SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK (SLF)**

Konsep penghidupan bagi terutama masyarakat miskin muncul dalam laporan komisi Brundtland tentang pembangunan berkelanjutan, yang mengargumentasikan perlunya penyeimbangan pembangunan antara aspek sosial dan aspek ekologis (WCED, 1987). Laporan ini memberikan pemahaman dan jalan baru dalam pengentasan kemiskinan, terutama setelah pendekatan sebelumnya seperti pembangunan pedesaan terpadu tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan (Ashley dan Carney, 1999; Bebbington, 1999; Chambers, 1995).

Penghidupan, merupakan terjemahan secara literal oleh penulis dari kata "*livelihood*" dalam bahasa Inggris, bermakna segala kegiatan dan posisi sosial ekonomi rumahtangga dalam mengakses dan mengalokasikan segala sumber daya untuk menopang kehidupan rumahtangga. Penghidupan bermakna jamak yaitu banyak kegiatan yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam mencari pendapatan. Kata "penghidupan" lebih tepat untuk menggantikan kata "pekerjaan", yang biasa dipakai untuk menjelaskan kegiatan untuk mendapatkan pendapatan,

bagi masyarakat pedesaan setidaknya karena dua alasan. Pertama, jenis kegiatan yang dilakukan oleh rumahtangga pedesaan, terutama rumahtangga miskin, sangat variatif dan tidak tetap. Seorang kepala rumahtangga yang oleh kantor statistik disebut sebagai petani, misalnya, pada kenyataannya justru menggunakan lebih banyak waktunya pada kegiatan yang tidak bertani, seperti menjadi buruh tani, tukang, buruh bangunan, berjualan, bahkan mengumpulkan hasil hutan, sebagai sumber pendapatannya. Dengan demikian, menamakan pekerjaan kepala rumahtangga tersebut sebagai petani tidaklah tepat. Kedua, untuk kontek pedesaan, unit analisis adalah rumahtangga, dimana semua anggota rumahtangga berkontribusi bagi pendapatan keluarga yang bisa saja berasal dari berbagai sumber. Kepala rumahtangga, istri dan anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan mencari nafkah untuk menopang ekonomi rumahtangga. Dengan demikian, secara literal, kata pekerjaan tidak dapat mewakilinya.

Untuk menganalisis penghidupan, sebuah kerangka analisis telah dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional seperti DFID, CARE, Oxfam dan United Nations Development Program yang disebut *sustainable livelihood framework* (SLF) (Carney *et al.*, 1999). Kerangka analisis ini menjelaskan bahwa penghidupan rumahtangga ditentukan faktor internal dan eksternal (Gambar 1). Faktor internal meliputi akses rumahtangga kepada lima *capital assets*, yaitu *human, natural, physical, financial* dan *social*. *Capital assets* yang dapat diakses oleh rumah tangga adalah modal yang dapat digunakan oleh rumah dalam menghadapi faktor eksternal. *Human capital* adalah kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia rumahtangga yang mungkin didayagunakan untuk mendukung penghidupan rumahtangga. *Natural capital* meliputi stok sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk penghidupan. *Physical capital* adalah infrastruktur dasar yang amat diperlukan untuk mendukung penghidupan. *Financial capital* adalah sumberdaya finansial (keuangan) yang digunakan untuk mencapai tujuan penghidupan rumahtangga. *Social capital* adalah posisi sosial dan keterlibatan rumahtangga dalam kegiatan sosial politik baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Akses dan kepemilikan atas aset-aset ini sangat ditentukan oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan sistem hukum. Faktor eksternal terdiri atas kondisi lingkungan fisik dan sosial yang diluar jangkauan dan kemampuan individu rumahtangga seperti kerentanan, struktur politik dan struktur sosial dan kelembagaan. Kesemuanya itu mempengaruhi akses rumahtangga terhadap aset modal yang diperlukan dalam penghidupan. Rumahtangga memutuskan untuk memilih strategi penghidupannya dengan mempertimbangkan aksesnya terhadap aset modal dan lingkungan eksternal tersebut. Struktural dan proses adalah sistem sosial politik dan hukum yang mengatur interaksi antar manusia dan antara manusia dan lingkungan. Situasi kerawanan dimana rumahtangga terekspos pada resiko, stres, dan bencana. Semua situasi ini menentukan strategi apa yang dipilih oleh rumahtangga dalam mencapai tujuan penghidupannya. Strategi adalah alokasi sumberdaya yang dapat diakses oleh rumahtangga untuk mencapai tujuan penghidupan. Tujuan penghidupan bisa saja bertahan dari kondisi krisis, memelihara tingkat penghidupan dan meningkatkan keamanan penghidupan (DFID, 1999).



Gambar 1. Sustainable Livelihood Framework (DFID, 1999)

Bagi masyarakat pedesaan, penghidupan sangat tergantung pada sumberdaya alam yang disediakan oleh lingkungan (*environmental services*) (Burton dan Soussan, 2003; Dugar dan Badenoch, 2002; WRI, 2001). Perubahan iklim memberikan pengaruh yang langsung pada kondisi lingkungan dimana masyarakat banyak menggantungkan kehidupannya tersebut. Perubahan iklim menyebabkan perubahan faktor eksternal penghidupan seperti terganggunya ketersediaan dan kualitas air, meningkatnya frekwensi bencana, ketidakpastian pergantian musim, dan bahkan rusaknya sumber alam. Terganggunya ketersediaan sumber daya alam, sebagai konsekwensi dari perubahan iklim, tentunya, berdampak negatif bagi penghidupan rumahtangga (Burton dan Soussan, 2003). Kekeringan akibat musim kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino pada tahun 1997, misalnya, menyebabkan turunnya debit air sungai antara 30%-50% di Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah dan Sulawesi Selatan (Irianto *et al.*, 2004). Penurunan debit sungai ini kemudian berdampak pada kekurangan air untuk mengairi sawah-sawah di propinsi-propinsi tersebut. Kondisi ini menyebabkan terganggunya penghidupan rumahtangga yang salah satu sumber penghidupannya adalah usahatani padi sawah.

Selain itu, rumahtangga atau masyarakat yang terganggu penghidupannya bisa saja adalah rumahtangga yang sangat rawan, yaitu rumahtangga yang terekspos pada bencana alam, sementara mereka menggantungkan hidupnya pada ketersediaan sumber daya alam dari lingkungan sekitar, dan tidak ada sistem sosial politik yang melindungi mereka saat mengalami masa sulit tersebut. Situasi ini menyebabkan banyak masyarakat rawan ini, kemudian, terjebak dalam tragedi kemanusiaan seperti malnutrisi, menderita penyakit akut dan akhirnya menjadi bagian dari kelompok masyarakat miskin akut (*chronic poverty*).

SLF memandu kita dalam memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi penghidupan masyarakat dan saling terkait satu dengan lainnya. Framework ini dapat digunakan baik untuk merancang intervensi kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan maupun untuk menilai kontribusi suatu kegiatan terhadap sustainabilitas penghidupan masyarakat. Belakangan bahkan

dikembangkan sebagai indikator dalam pengelolaan sumber daya alam (Campbell *et al.*, 2003; Shivakoti dan Shrestha, 2005a).

Allison dan Horemans (2006) mengemukakan prinsip-prinsip SLF yang merupakan kelebihan pendekatan ini dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, prinsip tersebut adalah: (1) menempatkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sebagai pusat analisis, (2) menilai intervensi kebijakan dan kegiatan pembangunan yang melewati batasan sektoral, (3) membangun keterkaitan antara makro-mikro, (4) responsif dan partisipatif, (5) membangun kekuatan, (6) mempertimbangkan keberlanjutan secara luas, ekonomi, sosial, kelembagaan dan lingkungan.

#### **IV. APLIKASI SLF**

Sebagai sebuah pendekatan, SLF telah diaplikasikan pada berbagai bidang. Tabel 1. merekapitulasi sebagian kecil dari contoh penerapan SLF dalam penelitian dan perencanaan program intervensi pemerintah/donor dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan. SLF digunakan dalam menganalisis secara terpadu keterkaitan antara kebijakan makro dan efeknya kepada mikro rumah tangga miskin pedesaan. SLF telah digunakan dalam membangun indikator dalam pengelolaan sumberdaya alam (Shivakoti dan Shrestha, 2005b). Mahdi, (2008) dan Mahdi *et al.* (2009) menganalisis efek dari desentralisasi, liberalisasi ekonomi makro dan perubahan kebijakan dalam pengelolaan SDA di Indonesia terhadap penghidupan masyarakat di dalam sub-DAS Batang Lembang Sumatera Barat dan dampak ikutannya pula bagi keberlanjutan pengelolaan DAS tersebut. Dimana perubahan kebijakan ditingkat makro tersebut menyebabkan terjadinya perubahan akses masyarakat terhadap kapital asset yang kemudian merubah strategi penghidupannya. Ellis dan Mdoe (2003) dan Orr dan Mwale (2001) juga telah melakukan hal yang sama, menggunakan SLF dalam menganalisis perubahan kebijakan ekonomi di tingkat nasional terhadap penghidupan dan kemiskinan rumah tangga di Afrika. Sementara Turton (2000a) menggunakan SLF dalam mempelajari efek dari beberapa program yang dikembangkan untuk memperbaiki kerusakan DAS terhadap perubahan penghidupan dan kemiskinan masyarakat yang hidup didalam DAS. Demikian pula Bradstock (2006) menggunakan framework ini dalam melihat perubahan akses rumah tangga miskin terhadap kapital asset sebagai akibat dari kebijakan land reform di Afrika Selatan.

Babulo *et al.* (2008) menggunakan SLF dalam mempelajari perbedaan strategi penghidupan rumah tangga miskin seiring dengan perbedaan akses rumah tangga yang bersangkutan terdapat sumberdaya hutan. Beck dan Nesmith, (2001) menggunakan cara yang sama dalam melihat akses rumah tangga terhadap *common pool resources (CPRs)* dan kaitannya dengan kemiskinan. Sementara dalam mempelajari penghidupan masyarakat dan kebijakan pengembangan pesisir juga telah digunakan secara luas framework ini seperti yang dilakukan oleh Allison dan Ellis (2001) dan Glavovic dan Boonzaier (2007). Dalam pengembangan konservasi, Kazoora (2002) menggunakan SLF dalam menganalisis dampak dari konservasi terhadap rumah tangga miskin, dimana konservasi memberikan pembatasan akses rumah tangga terhadap natural capital.



Tabel 1. Berbagai bentuk penerapan SLF dalam berbagai bidang

No	Bidang	Objek Kajian	Contoh Sumber
1	Pengelolaan DAS	Perubahan livelihood akibat perubahan kebijakan makro dan efeknya terhadap pengelolaan DAS di Sumatera Barat, Indonesia	Mahdi (2008) dan Mahdi <i>et al.</i> (2009)
		Perubahan penghidupan masyarakat sebagai dampak dari intervensi pembangunan DAS di India	Turton (2000a)
2	Pengelolaan hutan	Ketergantungan rumah tangga miskin terhadap sumberdaya kehutanan di Ethiopia	Babulo <i>et al.</i> (2008)
3	Pengelolaan irigasi	Pengembangan indikator pengelolaan irigasi di Nepal	Shivakoti dan Shrestha (2005b)
4	Air bersih	Analisis intervensi penyediaan air bersih dan penghidupan masyarakat	Nicol (2000)
5	Perikanan laut	Adaptasi nelayan kecil terhadap ketidakpastian (uncertainty)	Allison dan Ellis (2001)
7	Pengelolaan sumberdaya pesisir	Analisis kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan di Afrika Selatan	Glavovic dan Boonzaier (2007)
7	Reformasi agraria (land reform)	Perubahan livelihood masyarakat sebagai akibat dari land reform di Afrika Selatan	Bradstock (2006)
8	Kebijakan makro ekonomi	Analisis dampak perubahan kebijakan ekonomi makro terhadap penghidupan petani kecil di Malawi	Orr dan Mwale (2001)
9	Penghidupan kemiskinan pedesaan	Analisis dampak kebijakan di tingkat nasional terhadap kemiskinan dipedesaan Tanzania	Ellis dan Mdoe (2003)
10	Kemiskinan dan penghidupan	Analisis kaitan antara kemampuan petani kecil, penghidupan dan kemiskinan di Andes, Amerika Latin	Bebbington (1999)
11	Pengentasan kemiskinan	Analisis program pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di Kamboja	Turton (2000b)
12	Common pool resources dan kemiskinan	Analisis keterkaitan antara pengelolaan CPRs dengan kemiskinan di India dan Afrika Barat	Beck dan Nesmith (2001)
13	Konservasi SDA	Analisis keterkaitan antara program konservasi SDA dan pengentasan kemiskinan di Uganda	Kazoora (2002)

Dari aplikasi SLF tersebut diatas, maupun pengalaman penulis sendiri dalam menggunakannya, terdapat tiga hal yang memperlihatkan kekuatannya sebagai sebuah framework maupun sebagai alat analisis. Adapun kekuatan tersebut adalah:

- SLF sangat membantu dalam mengintegrasikan perspektif dan pemahaman dari saling terkait yang kompleks antar komponen penghidupan.
- Komponen asset capital yang terdapat dalam SLF menggarisbawahi pentingnya akses pada asset tersebut dan penguasaannya bagi penghidupan.

- SLF memandu kita dalam memahami keterkaitan antara masyarakat dan DAS dan juga potensi konflik antara berbagai bentuk kehidupan masyarakat.
- Dalam menganalisis sebuah kegiatan intervensi, analisis tidak hanya berfokus pada proyek melainkan juga aspek diluarnya yang terkait erat.

## V. KRITIKAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN

Namun demikian, beberapa kritikan dan saran pengembangan terus dilakukan, terutama oleh peneliti dan pengambil kebijakan yang telah menggunakan SLF ini. Pertama, SLF dalam aplikasinya memerlukan team multidisiplin, karena pendekatannya yang meliputi banyak aspek. Karena sifat yang demikian, maka peneliti individual kesulitan menggunakannya. Kedua, beberapa element belum dimasukkan kedalam framework yang perlu dipertimbangkan, seperti pemberdayaan dan proses politik (Ashley, 2000). Dengan demikian, evolusi pemikiran ini terus berlanjut dan menjadi landasan bagi pengembangan framework ini dimasa depan.

## VI. KESIMPULAN

Kita masyarakat akademis dan pengambil kebijakan pembangunan pedesaan dan kemiskinan di Indonesia tidak banyak mengikuti perkembangan konsep pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan selama satu dekade terakhir karena disibukkan oleh krisis sosial, politik dan ekonomi. Sementara, disisi lain, persoalan kemiskinan dan pembangunan pedesaan Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih besar seiring perubahan struktur sosial politik dan perekonomian. SLF adalah merupakan pendekatan yang banyak mendapat perhatian akademisi dunia dan digunakan oleh banyak lembaga donor dalam mengembangkan program pengentasan kemiskinan karena sifatnya yang lebih komprehensif dan merupakan bentuk akumulasi dan koreksi atas pemikiran pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang telah berkembang dari dekade-dekade sebelumnya. Kritikan atas kelemahannya menandakan bahwa *framework* ini bukanlah pendekatan yang final namun masih sangat peluang bagi pengembangannya di masa depan.

## VII. BAHAN BACAAN

- Allison, E. H., dan Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine Policy*, 25 (5), 377-388.
- Allison, E. H., dan Horemans, B. (2006). Putting the principles of the Sustainable Livelihoods Approach into fisheries development policy and practice. *Marine Policy*, 30 (6), 757-766.
- Ashley, C. (2000). *Applying Livelihood Approaches to Natural Resource Management Initiatives: Experiences in Namibia and Kenya* (Working Paper 134). London: Overseas Development Institute (ODI).
- Ashley, C., dan Carney, D. (1999). *Sustainable livelihoods: Lessons from early experience*. London: Department for International Development

- Babulo, B., Muys, B., Nega, F., Tollens, E., Nyssen, J., Deckers, J., dan Mathijs, E. (2008). Household livelihood strategies and forest dependence in the highlands of Tigray, Northern Ethiopia. *Agricultural Systems*, 98 (2), 147-155.
- Bebbington, A. (1999). Capitals and Capabilities: A Framework for Analyzing Peasant Viability, Rural Livelihoods and Poverty. *World Development*, 27 (12), 2021-2044.
- Beck, T., dan Nesmith, C. (2001). Building on Poor People's Capacities: The Case of Common Property Resources in India and West Africa. *World Development*, 29 (1), 119-133.
- Bezemer, D., dan Headey, D. (2008). Agriculture, Development, and Urban Bias. *World Development*, 36 (8), 1342-1364.
- Bouahom, B., Douangsavanh, L., dan Rigg, J. (2004). Building sustainable livelihoods in Laos: untangling farm from non-farm, progress from distress. *Geoforum*, 35, 607-619.
- Bradstock, A. (2005). Changing Livelihoods and Land Reform: Evidence from the Northern Cape Province of South Africa. *World Development*, 33 (11), 1979-1992.
- Bradstock, A. (2006). Land reform and livelihoods in South Africa's Northern Cape province. *Land Use Policy*, 23 (3), 247-259.
- Burton, I., dan Soussan, J. (2003). *Livelihoods and Climate Change: Combining disaster risk reduction, natural resource management and climate change adaptation in a new approach to the reduction of vulnerability and poverty*. (A Conceptual Framework Paper Prepared by The Task Force on Climate Change, Vulnerable Communities and Adaptation). Winnipeg, Manitoba Canada: International Institute for Sustainable Development (IISD), The World Conservation Union (IUCN), Natural Resource Management Rural Economy Local Governance and Civil Society, Stockholm Environment Institute (SEI).
- Campbell, B., Sayer, J. A., Frost, P., Vermeulen, S., Porez, M. R., Cunningham, A., dan Prabhu, R. (2003). Assessing the Performance of Natural Resource Systems. Dalam B. Campbell & J. A. Sayer (Eds.), *Integrated Natural Resource Management Linking Productivity, The Environment and Development* (pp. 267-292). Oxon, UK: CABI Publishing.
- Carney, D., Drinkwater, M., Rusinow, T., Neefjes, K., Wanmali, S., dan Singh, N. (1999). *Livelihoods Approaches Compared: A brief comparison of the livelihoods approaches of the UK Department for International Development (DFID), CARE, Oxfam and the United Nations Development Programme (UNDP)*. London: Department for International Development (DFID).
- Carriere, E. (2001). *Scaling Up: Sustainable Livelihoods Approaches and Policy Formulation*. Paper dipaparkan pada Regional Sustainable Livelihoods Workshop. Bangladesh 8-10 May 2001.
- Chambers, R. (1992). *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory* (IDS Discussion Papers - 311). Brighton: Institute of development Studies (IDS).
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7 (1), 173-204.
- Chambers, R., dan Conway, G. R. (1992). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for 21st century* (IDS discussion paper 296). Brighton: University of Sussex, Institute for Development Studies (IDS).
- Department for International Development (DFID). (1999). *Sustainable Livelihoods Guidance Sheets*. Retrieved 10 August 2005, from <http://www.livelihoods.org/info/>.

- Dupar, M., dan Badenoch, N. (2002). *Environment, Livelihoods, and Local Institutions Decentralization in Mainland Southeast Asia*. Washington, DC: World Resources Institute.
- Ellis, F., dan Bahiigwa, D. (2003). Livelihoods and Rural Poverty Reduction in Uganda. *World Development*, 31 (6), 997-1013.
- Ellis, F., dan Biggs, S. (2001). Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s. *Development Policy Review*, 19 (4), 437-448.
- Ellis, F., dan Mdoe, N. (2003). Livelihoods and Rural Poverty Reduction in Tanzania. *World Development*, 31 (8), 1367-1384.
- Gellert, P. K. (2005). The Shifting Natures of "Development": Growth, Crisis, and Recovery in Indonesia's Forests. *World Development*, 33 (8), 1345-1364.
- Glavovic, B. C., dan Boonzaier, S. (2007). Confronting coastal poverty: Building sustainable coastal livelihoods in South Africa. *Ocean & Coastal Management*, 50 (1-2), 1-23.
- Hussein, K., dan Nelson, J. (1998). *Sustainable Livelihoods and Livelihood Diversification* (IDS Working Papers - 69). Brighton: Institute of development Studies (IDS).
- Irianto, G., Surmaini, E., dan E.Pasandaran. (2004). Dinamika Iklim dan Sumber Daya Air untuk Budi Daya Padi: Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Dalam F. Kasryno, E. Pasandaran & A. M. Fagi (Eds.), *Ekonomi Perberasan Indonesia* (pp. 255-276). Jakarta, Indonesia: Departemen Pertanian Republik Indonesia.
- Kazoora, C. (2002). *Poverty alleviation and conservation: linking sustainable livelihoods and ecosystem management a case study of Uganda*: IUCN - The World Conservation Union, Eastern Africa.
- Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *Manchester School of Economic and Social Studies*, 22 (2), 139-191.
- Madjan, E. (1994). Pertanian dalam perspektif masa depan. Dalam Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Ed.), *Beberapa segi perkembangan ilmu pertanian dan pemanfaatannya* (pp. 1-20). Padang: Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- Mahdi. (2008). *Local responses to changing contexts of natural resources management: case study at Lembang sub-watershed of West Sumatra, Indonesia*. Unpublished Dissertation, Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok.
- Mahdi, Shivakoti, G., dan Schmidt-Vogt, D. (2009). Livelihood Change and Livelihood Sustainability in the Uplands of Lembang Subwatershed, West Sumatra, Indonesia, in a Changing Natural Resource Management Context. *Environmental Management*, 43 (1), 84-99.
- Nicol, A. (2000). *Adopting A Sustainable Livelihoods Approach to Water Projects: Implications for Policy and Practice* (Working Paper). London: Overseas Development Institute.
- Orr, A., dan Mwale, B. (2001). Adapting to Adjustment: Smallholder Livelihood Strategies in Southern Malawi. *World Development*, 29 (8), 1325-1343.
- Paitoonpong, S., Abe, S., dan Puopongsakorn, N. (2008). The meaning of "social safety nets". *Journal of Asian Economics*, 19 (5-6), 467-473.
- Parnwell, M. J. G. (2005). The Power to Change: Rebuilding Sustainable Livelihoods in North-East Thailand. *The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies* 4.
- Rahman, A., dan Westley, J. (2001). The Challenge of Ending Rural Poverty. *Development Policy Review*, 19 (4), 553-562.

- Ranis, G. (2004). *The Evolution of Development Thinking: Theory and Policy*. Paper dipaparkan pada The Annual World Bank Conference on Development Economics. Washington. May 3-4, 2004.
- San, N. N., Löfgren, H., dan Robinson, S. (2000). *Structural Adjustment, Agriculture, and Deforestation in the Sumatera Regional Economy* (TMD Discussion Papers). Washington: International Food Policy Research Institute.
- Shackleton, C. M., Shackleton, S. E., Buiten, E., dan Bird, N. (2007). The importance of dry woodlands and forests in rural livelihoods and poverty alleviation in South Africa. *Forest Policy and Economics*, 9 (5), 558-577.
- Shivakoti, G., dan Shrestha, S. (2005a). Analysis of Livelihood Asset Pentagon to Assess the Performance of Irrigation Systems: Part 1 – Analytical Framework. *Water International*, 30 (3), 356–362.
- Shivakoti, G., dan Shrestha, S. (2005b). Analysis of Livelihood Asset Pentagon to Assess the Performance of Irrigation Systems: Part 2 – Application of Analytical Framework. *Water International*, 30 (3), 363–371.
- Suryahadi, A., Sumarto, S., dan Pritchett, L. (2003). *The Evolution of Poverty during the Crisis in Indonesia*: SMERU Research Institute.
- Turton, C. (2000a). *Sustainable Livelihoods and Project Design in India* (Working Paper 127). London: Overseas Development Institute (ODI).
- Turton, C. (2000b). *The Sustainable Livelihoods Approach and Programme Development in Cambodia* (Working Paper 130). London: Overseas Development Institute (ODI).
- Warr, P. G. (2000). Poverty incidence and economic growth in Southeast Asia. *Journal of Asian Economics*, 11 (4), 431-441.
- World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford, UK: Oxford University Press
- World Resources Institute (WRI). (2001). *World Resources 2000-2001: the Fraying Web of Life People and Ecosystems*. Washington. D.C.: World Resources Institute (WRI).
- Yonariza. (2007). *Protected Area and Local Livelihood: A Study of People-Forest Interaction in Barisan I Nature Reserve, West Sumatra Indonesia*. Unpublished Dissertation, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.